

LATAR BELAKANG DAN ARAH KEBIJAKAN KAPOLRI

DI BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

Oleh : Irjen Pol Drs. R. Abubakar Nataprawira SH

Selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Polri sebagai satu lembaga fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokoknya akan selalu bersentuhan dengan publik. Citra atau citra Polri dapat dilihat dari berbagai kegiatan, tindakan bahkan perilaku baik secara individu maupun organisasi. Opini publik yang positif sangat diperlukan institusi Polri dalam menjalankan tugas pokoknya secara profesional. Opini publik yang positif terhadap Polri akan membentuk citra Polri yang positif pula, dengan citra Polri yang positif inilah akan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri semakin tinggi sehingga diharapkan adanya saling percaya dan timbul suatu hubungan masyarakat kepada Polri berupa kerjasama dalam kemitraan. Hal ini sejalan dengan strategi Polri.

Keamanan dan rasa aman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia secara individu maupun kelompok / masyarakat disamping kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Ketidakteraturan sosial dan keamanan selalu ada, karena potensi, sumber dan penyebabnya selalu muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Keadaan ini harus selalu dicegah agar proses pembangunan dibidang kesejahteraan dapat berjalan dengan baik. Upaya untuk mencegah timbulnya dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, keberhasilannya sangat ditentukan dari kualitas partisipasi dan keterlibatan masyarakat berserta aparat pemerintahannya. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek, partisipasinya menjadi sangat urgen karena akan timbul perasaan memiliki dan bertanggung jawab (*sense of belonging and responsibility*) pada dirinya bukan hanya didasarkan pada aturan semata tetapi muncul secara sadar dari diri pribadi setiap anggota masyarakat. Sikap ini akan memudahkan terwujudnya interaksi dan komunikasi dalam kesetaraan dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial antara masyarakat dan aparatur Negara baik secara individu maupun institusi.

Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil (*Civilian Police*), harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara paradigma yang menitik beratkan pada pendekatan reaktif dan konvensional menuju pendekatan proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Paradigma berpikir dan bertindak Polri yang sebelum reformasi cenderung sebagai alat penguasa atau alat bagi kepentingan pihak tertentu, saat ini telah bergeser menuju kearah pengabdian yang tulus dan ikhlas untuk kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara. Hal ini telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar dan salah satu perubahan tersebut adalah perumusan kembali peran Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa Polri berperan selaku pemeliharaan Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayomdan pelayan masyarakat. Dalam

melaksanakan peran tersebut, Polri tidak hanya berkiblat pada hukum perundang-undangan nasional, tetapi juga mengikuti prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam perpolisian internasional yang sejalan dengan upaya membangun masyarakat madani khususnya kepolisian sipil yang menekankan pada pendekatan kemanusiaan untuk menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Model penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagaimana tersebut diatas dikenal dengan berbagai nama seperti *community oriented policing: community based policing*. Konsep *community policing* pada hakekatnya bukanlah merupakan hal yang asing dan baru bagi Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia, kebijakan Sistem Kamtibmas Swakarsa yang diangkat dari nilai-nilai sosial kultural masyarakat Indonesia yang lebih menjunjung nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *community policing*.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dipandang perlu mengadopsi konsep *community policing* dan menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dengan cara dan dengan nama Indonesia yang diberi nama "**Perpolisian Masyarakat**" dan untuk selanjutnya secara konseptual dan operasionalnya kita sebut "**Polmas**", yang dijadikan sebagai suatu kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan tugas Polri. Tujuan pokok Humas tidak lain membangun *favorable relationship with the public*. Buku lain tentang PR menulis "*gaining public understanding and acceptance*" (supaya publik memahami dan menerima keberadaan serta kiprah organisasi). **Jika publik memahami dan menerima keberadaan serta kiprah organisasi, maka hampir dipastikan publik bersedia memberikan dukungannya.**

Sebaliknya, jika publik antipati terhadap organisasi kita, janganakan dukungan, kalau tidak dicaci-maki publikpun sudah harus bersyukur. Khusus instansi pemerintah, membangun hubungan positif dengan publik memiliki arti amat strategis. Untuk itu, *trust building* merupakan prasyarat mutlak.

Bagaimana kita bisa membangun relasi positif dengan publik, jika publik sudah



Kadiv Humas Polri Irjen Pol Drs. R. Abubakar Nataprawira, SH.

kehilangan kepercayaan apalagi marah pada organisasi kita termasuk pimpinannya. Pemerintah Amerika sekarang yang dipimpin oleh Presiden Bush, misalnya, berjalan terseok-seok. Seolah-olah yang dilakukan pemerintah, rakyat Amerika nyaris tidak percaya lagi. Pangkal sebabnya, kita sudah ketahui bersama, karena

Presiden Bush terlalu sering berbohong pada rakyatnya. Invasi pasukan Amerika dan sekutunya ke Irak pada 2003 dikatakan untuk menghancurkan *mass destruction weapon* (MDW, senjata pemusnah massal) yang dimiliki pemerintah Saddam Husein yang membahayakan perdamaian dunia. Alasan lain yang kemudian dikembangkan: Saddam "bermain mata" dengan Osama bin Laden. Tapi, dikemudian hari justru aparat intelijen Amerika sendiri yang menepis kedua "teori" ini. Ketika pemerintah Bush sejak tahun lalu menghimpun dukungan opini dunia untuk mengecam Iran yang dituding sedang "ngebut" dengan program pembuatan senjata nuklir, masyarakat internasional pun enggan memberikan dukungan. Ketika isu nuklir Iran belum reda, lagi-lagi aparat intelijen Amerika yang secara resmi mengumumkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mengatakan Iran sedang membangun senjata nuklir.

Bush, dengan demikian, terbukti sering melakukan kebohongan publik. Citra pemerintahannya, juga citranya sebagai Kepala Negara, dengan sendirinya rontok. Dalam kondisi demikian, sulit diharapkan dukungan rakyat. Juru bicara gedung putih pun tidak mampu berbuat apa-apa untuk merebut simpati rakyat. Hampir dipastikan Presiden Amerika berikutnya berasal dari Partai Demokrat. Sementara ini, mayoritas rakyat Amerika tampaknya tidak lagi percaya pada Partai Republik. Kegiatan Humas mencakup komunikasi dua arah antara organisasi dan

publiknya. Siapa publik organisasi Anda, tentu Anda sudah mengidentifikasinya dengan cermat. Untuk itu, Humas secara rutin *dissiminate messages about its product, services or overall image to its customers, employees, stockholders, or other interested members of the community*. Untuk mencapai tujuan organisasi, penting bagi Humas untuk senantiasa mendengar suara dan aspirasi publik atau konstituen, dalam segala bidang yang menjadi tujuannya. Bukan sekedar mendengar, tapi juga menganalisis dan memahami sikap dan perilaku konstituen itu. Hanya dengan memahami secara tepat aspirasi mereka, serta dalam batas maksimal memenuhinya, organisasi melalui Humasnya dapat melancarkan kampanye atau rangkaian kegiatannya secara efektif dan efisien.

Bagaimana kita memahami dan menganalisis aspirasi publik, atau lebih tepat konstituen, serta bagaimana kita melancarkan kampanye Humas, dukungan media khususnya media massa sangat krusial. Sebagaimana kita ketahui, komunikasi dua arah antara *public organizer*, dan masyarakat dalam Negara modern, khususnya era informasi, sebagian besar dilakukan melalui perantara media.

Presiden atau segenap menteri tidak bisa sering-sering berbicara langsung dengan rakyat, tapi lebih banyak melalui media massa. Begitu juga sebaliknya rakyat berbicara kepada pemerintah melalui media massa. Dua puluh orang melakukan unjuk rasa di bundaran Hotel Indonesia pun bisa dipandang sebagai komunikasi antara sekelompok masyarakat kepada pemerintah, jika mendapat liputan cukup kuat dari media massa.

Dalam konteks ini, penting bagi setiap pejabat Humas, khususnya Humas organisasi yang besar untuk memahami sepak terjang media massa kita dewasa ini. Berbeda dengan PR perusahaan-perusahaan swasta, Humas instansi pemerintah sampai sekarang, tampaknya masih kurang menyadari pemanfaatan media untuk mencapai sasarannya. Sebetulnya, dengan pemahaman yang benar, kita dapat "menguasai" media, sekaligus, memanfaatkan media untuk membangun kepercayaan dan dukungan publik terhadap organisasi kita. Pejabat humas di sini adalah membangun solid *public opinion* terhadap organisasi.

Pers dalam sistem pemerintah demokrasi

memiliki fungsi sangat penting. Di Negara negara barat, fungsi paling pokok per dikatakan "as a watchdog (anjing penjaga)". Pers mengawasi jalannya roda pemerintah dalam segala aspeknya. Istilah "watchdog" di negara kita mungkin, terkesan terlampaui keras. Pertama, seolah-olah pemerintah terus menerus harus ditongkrong oleh "tukang pentungan". Kedua, seolah-olah wartawan adalah manusia super yang tidak punya salah atau tidak mungkin pernah berbuat salah. Di Negara-negara sedang berkembang, istilah "control social" mungkin lebih tepat dibandingkan "anjing penjaga". Kecuali fungsi pokoknya untuk menjalankan kontrol sosial, pers juga berfungsi memberikan informasi, hiburan dan pendidikan kepada masyarakat luas. Fungsi informatif dan edukatif penting, jika dikaitkan dengan pelaksanaan demokrasi. Sebab untuk menjalankan hak-haknya masyarakat sangat membutuhkan informasi. Masyarakat harus betul-betul "well informed". Media massa yang terutama memasok informasi yang dibutuhkan masyarakat

Tapi harus diakui bahwa kecuai mengemban fungsi-fungsi penting, per kerap kali juga mengalami disfungsi atau "malpraktek" meminjam istilah dalam dunia kedokteran. Maksudnya, tidak sedikit oknum wartawan kita yang menyalahgunakan profesi kewartawanannya untuk berbagai kepentingan pribadi atau kekuatan politik tertentu. "Malpraktek" wartawan bisa dalam bentuk tulisan yang melanggar kode etik jurnalistik misalnya mempublikasikan (a) rumor yang tidak berdasarkan fakta atau terkait masalah-masalah sensitive yang mestinya tidak terlalu cepat dipublikasikan kepada publik, (b). Berita bohong yang bisa meresahkan masyarakat, (c). berita yang bersifat pencemaran nama baik, fitnah dan (d). melanggar norma susila yang berlaku (pornografi). Kami yakin pihak Dewan Pers mempunyai catatan cukup lengkap dalam hal ini, mengingat masyarakat kita kini juga aktif "mengawasi" sepak terjang pers kita. Dan mereka pun mempunyai kesadaran untuk melapor kepada Dewan Pers manakala pihaknya merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Pelanggaran terhadap kode etik atau profesi wartawan bukan semata-mata "dominasi pers di negara-negara sedang berkembang. Bahkan di Negara-negara maju pun delik pers juga kerap terjadi. Yang paling banyak, mungkin delik pencemaran nama baik (Libel, defamation).

Sepak terjang pers Indonesia di era reformasi, secara umum, dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Cenderung menempatkan dirinya dalam posisi tertinggi dari semua institusi yang ada di Negara. Bahkan kepala Negara pun

dipandanginya "subordinate" pers. (Presiden pun bisa kami jatuhkan...!).

- b. Cenderung tidak menghormati prinsip-prinsip objektivitas, impartiality, dan check and balanced. Berita bohong, berita yang tidak jelas faktanya, fitnah dan provokasi sering menghiasi media kita.
- c. Fakta dan opini kerap dicampur adukan
- d. Paling sering menabrak prinsip praduga tak bersalah.
- e. Cenderung arogan, tidak mau tunduk pada kode etik, mau senang sendiri contoh ; soal hak jawab, *lex specialis*, kriminalisasi pers.
- f. Kritik dan kecaman dan sering dilancarkan sngar dan sadis, walaupun tidak jarang kritik tersebut, tidak berdasar sama sekali (*baseless accusation*).

Semua ini disebabkan adanya *mind set* di sementara wartawan bahwa (1) pers adalah kekuatan keempat (*fourth estate*), pilar demokrasi yang sama kedudukannya dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif. (2) Oleh sebab itu, kebebasan pers mutlak dihormati semua pihak, tidak boleh dihalangi atau dibatasi oleh siapa pun dalam bentuk apa pun.

Dengan segala kekurangannya, pers tetap harus diterima sebagai mitra oleh orang-orang Humas, sebab perspun mempunyai banyak kelebihannya; Dari pemberitaan pers kita memperoleh : Factual Information; Relaksi dan opini masyarakat; Usulan, gagasan dan interpretasi (aspirasi) publik dan Business intelligence.

Tentu melalui media, Humas juga melancarkan segala aktivitas kehumasannya. Baik yang bersifat rutin maupun yang taktis dan strategis. Pertanyaannya : Bagaimana humas memanfaatkan media untuk mencapai sasarannya, khususnya untuk membangun citra positif organisasi?

Beberapa langkah berikut bisa dipertimbangkan :

1. Identifikasi sejumlah media yang kita nilai "terhormat", termasuk pimpinannya.
2. Jalin *interpersonal communication* yang akrab dengan mereka melalui (a) pertemuan periodik, (b) *coffee morning*, (c)

sekali-kali mengikutsertakannya dalam kunjungan kedinasan (d) pertemuan formal untuk memberikan informasi latarbelakang tentang kegiatan organisasi/instansi kita.

3. Hubungan dua arah ini mutlak terpelihara dan ditingkatkan, sehingga sampai pada titik terjalinnya saling percaya. Yang penting dalam batas tertentu kita harus terbuka pada media, kemukakan misalnya apa kesulitan dan tantangan yang dihadapi organisasi kita kemukakan juga keterkaitan kegiatan organisasi kita dengan *public interest*, sehingga apa yang dilakukan

akibat opini negatif yang sudah terbentuk sebelumnya. Oleh karena itu untuk menetralkan dan menepis tuduhan tersebut diatas diperlukan tugas dan peranan Divisi Humas Polri beserta jajarannya baik yang ada di Mabes Polri maupun di wilayah satuan kerja masing-masing Polda, untuk meningkatkan kemampuan dan mengambil langkah positif, sehingga dapat terwujudnya opini masyarakat yang menguntungkan bagi institusi Polri. Pemanfaatan media semakin terasa sangat diperlukan dan sudah tidak bisa diabaikan lagi, sehingga Divisi Humas Polri yang merupakan

corong untuk kepentingan masyarakat dari berbagai pihak untuk membangun opini citra Polri dituntut mampu mengkomunikasikan dan menjabarkan secara logis, rasional, *capable*, bertanggung jawab dan transparansi publik terhadap informasi yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kesemuanya dapat dipahami, dimengerti dan diakui kebenarannya oleh masyarakat dan berbagai pihak.



Kadiv Humas Polri memberikan ceramah di depan Pasis Saspimpol.

organisasi benar-benar untuk kepentingan rakyat.

Wartawan adalah manusia juga, manusia yang memiliki aspirasi, kebutuhan dan sebagainya. Dengan mengetahui segala hal kekuatan dan kelemahan wartawan, pejabat humas yang profesional mestinya mampu menjalin hubungan yang sinergis dengan media. Jika hal ini sudah dicapai, media dalam batas tertentu akan menjadi mitra organisasi kita; bahkan untuk dapat memajukan organisasi kita. Akhir-akhir ini Polri sedang mendapat sorotan dari segenap lapisan masyarakat dan berbagai kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta, baik di dalam negeri sendiri maupun yang dari luar negeri. Kiranya dapat kita rasakan betapa gencarnya tanggapan, kritikan, celaan yang ditujukan kepada institusi Polri ketika terjadi tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri yang dipandang negatif menurut kacamata mereka.

Disisi lain keberhasilan kinerja Polri yang sudah diraih dan mendapat penghargaan dalam prestasinya, namun bisa hilang begitu saja

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan suatu strategi dalam pembentukan opini dan memanfaatkan media massa dalam mengkampanyekan Visi, Misi dan Paradigma Polri serta pelaksanaan tugas-tugas Polri dilapangan. Disisi lain, karena adanya kepentingan pers sebagai perusahaan yang *profit oriented* dan kepentingan pihak-pihak tertentu, kebebasan yang didapat sering dimanfaatkan untuk membentuk opini yang bersifat tendensius, propagandis dan mengabaikan prinsip-prinsip netralitas keseimbangan dari suatu pemberitaan, sehingga kebenaran dari sebuah berita menjadi sangat relatif.

Kebebasan pers ini tidak hanya dimanfaatkan oleh insan pers, tetapi juga masyarakat yang secara antusias mengekspresikan berbagai aspirasinya yang memang telah sekian lama terbenung pada era sebelumnya sehingga media massa dapat mengangkat peristiwa sekecil apapun yang terjadi dilingkungan kita sehari-hari yang tidak jarang pengungkapannya melanggar norma-norma, baik norma susila, etika bahkan norma hukum. Dengan menyadari fenomena tersebut,

diatas, fungsi pers sebagai media informasi yang mendidik "to educate", dan kontrol sosial didalam kegiatannya melakukan pengkajian dan penyediaan informasi yang layak disajikan bagi masyarakat dituntut untuk dapat menyajikan informasi berupa berita-berita di media massa secara jujur, obyektif, benar dan akurat. Hal ini dapat terwujud apabila para wartawan yang mencari berita dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Jurnalistik Indonesia, dan memahami Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Pers bukan hanya sebagai alat untuk mengekspresikan pendapat dan ide, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator untuk interaksi kehidupan masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kontrol sosial serta dipercaya sebagai pembentukan opini yang ampuh dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Oleh karena itu terjalinnya hubungan baik yang harmonis antara Humas Polri dengan Media Massa merupakan langkah strategi dalam rangka membangun opini publik yang positif melalui kunjungan-kunjungan ke media-media guna merubah paradigma media yang selama ini terkesan negatif menjadi positif. Di samping itu Divisi Humas Polri sebagai pengemban fungsi Kehumasan dilingkungan Polri harus dapat memainkan peran yang kreatif dan lebih efektif dalam menjembatani komunikasi antara Polri dengan Lembaga/Instansi Pemerintah yang sudah dikenal dengan **Bakohumas**, Polri yang nantinya dalam penyediaan informasi dan berita yang akan disajikan untuk media masa, secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai agen pembangunan opini publik yang positif terhadap Polri di seluruh wilayah Indonesia (*agen of image building*).

Terbentuknya opini dan citra Polri adalah dampak pemberitaan media massa selama ini, sangat mungkin dipengaruhi aspek kendala Humas dalam mengakses informasi serta kurangnya mengangkat hal-hal positif (peluang) pelaksanaan tugas pokok Polri antara lain :

Kendala

1. **Tersumbatnya akses memperoleh informasi;** Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya sosialisasi mengenai cara memperoleh akses informasi dapat menjadi penyebab tersumbatnya arus informasi dimana suatu informasi adalah milik publik bukan milik pemerintah atau perorangan, sehingga setiap orang cq pelaksana Humas suatu instansi agar tidak menghambat media massa memperoleh informasi (Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers).
2. **Akuntabilitas Informasi;** Tingkat kepercayaan terhadap informasi ditentukan

oleh kualitas produk informasi . data yang cepat, lengkap dan akurat dari sumber informasi yang kompeten. Tidak lengkapnya informasi pada pelaksana fungsi Humas di tingkat Mabes Polri maupun Satwil/Polda dari sumber pemasok informasi internal akan berdampak media massa yang bersangkutan yang mencari informasi/data dari sumber yang tidak berkompetensi, hal ini berakibat timbulnya bias/ kesimpangsiuran opini.

3. **Pemahaman atas informasi;** Pemahaman yang tepat atas sebuah informasi sangat penting jika pelaksana Humas atau masyarakat tidak cukup luas / mendalam pemahamannya atas informasi yang tersajikan dapat menimbulkan analisa atau opini yang merugikan Polri. Kompetensi penilaian atas sebuah informasi harus sesuai kriteria tertentu yang dapat dipahami secara tepat dan utuh.
4. **Pembelokan Kepentingan;** Adanya kepentingan tertentu sangat dimungkinkan ada kesenjangan menyajikan informasi tidak seimbang, sehingga dapat merugikan Polri dan masyarakat pada umumnya, seperti release pengacara dan pejabat Polri cq Humas Polri.
5. **Teknologi Informasi;** Penerapan system dan teknologi informasi yang belum memadai pada operasionalisasi fungsi Humas Polri akan sangat menghambat pengelolaan dan kecepatan penyajian informasi pada masyarakat melalui media massa.
6. **Personel Kehumasan;** Sangat minimnya tenaga profesional yang mengawaki fungsi Divisi Humas sangat mempengaruhi lemahnya kinerja dan produk informasi opini yang dihasilkan.
7. **Terputusnya akses informasi ditingkat Satwil/Polres dan Polresta;** Secara struktural kelembagaan Humas Polri keberadaannya hanya sampai ditingkat Polda, serta adanya kebebasan pers mendorong menjamunya media massa lokal ditiap Kabupaten dan wilayah lainnya, sehingga menimbulkan hambatan mengakses informasi suatu fenomena yang terjadi diwilayah tersebut bagi pembentukan opini Polri.
8. **Sulitnya Informasi Internal;** Macetnya dan atau pembatasan pasokan informasi dari pelaksana fungsional Polri pada fungsi Humas Polri akibat tiadanya informasi yang dapat dikomunikasikan pada pers dan masyarakat umumnya, *deadline* pers akan berusaha mencari informasi sedapatnya

dari sumber informasi eksternal yang tidak berkompoten berakibat timbulnya opini negatif Polri atas suatu fenomena/kejadian tertentu.

9. **Dukungan Anggaran;** Terbatasnya anggaran tidak memungkinkan Humas mengembangkan aktivitas dengan produk-produk Kehumasan yang *parallel* dengan menjamunya informasi dan opini Polri yang diberitakan media massa, serta penggalangan dana dengan kerjasama institusional atau media massa tertentu dapat beresiko terhadap keterikatan kinerja, konsistensi atas kewenangan dan jabatan tugas.

Peluang

Pelaksanaan tugas dan wewenang Polri selama ini dalam realisasinya yang penting dan menonjol dapat dikemukakan sebagai keberhasilan tugas antara lain :

1. **Bidang Harkamtibmas;** Crime total, Crime cleared, Clearance Rate, Crime Rate, Crime Clock.
2. **Bidang Penegakan Hukum;** Kejahatan Trans Nasional, Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Kejahatan Kontijensi, Kejahatan Konvensional, Bidang Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan masyarakat, Penanganan Bencana Alam, Penanganan Hari Besar Keagamaan, Pengamanan Lalu Lintas.
3. **Bidang Khusus;** Eksistensi ops Kepolisian, Rapat Kerja Kapolri dengan Komisi DPR-RI, Dan Lainnya.

Intensifikasi Kinerja fungsi Humas Polri dalam mengatasi tantangan transparansi dan akuntabilitas informasi di era globalisasi saat ini, perlu mengimplementasikan teknik dan taktis peran fungsional Humas secara sinergi dalam mengelola dan mengkomunikasikan informasi bagi pembangunan opini positif pelaksanaan tugas Polri. Implementasi kehumasan Polri pada hakikatnya didasarkan atas landasan hukum bahwa setiap personel Polri dan pejabat fungsional khususnya dapat berfungsi sebagai pengemban fungsi Humas dan sumber informasi bagi media massa dalam rangka pembangunan opini masyarakat yang positif bagi pelaksanaan tugas Polri, guna memperoleh citra Polri yang positif sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta penegak hukum yang profesional dan dapat dipercaya masyarakat, sehingga dapat memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat.***